

PEREMPUAN SUNDA DAN PELACURAN DI ZAMAN KOLONIAL *Sundanese Women and Prostitution in the Colonial Era*

Gani Ahmad Jaelani

Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21
E-mail: gani.jaelani@unpad.ac.id

Naskah diterima: 19 Mei 2020 - Revisi terakhir: 10 September 2020

Disetujui terbit: 15 November 2020 - Tersedia secara *online*: 30 November 2020

Abstract

This article aimed to analyze the relationship between Sundanese women and prostitution practices in the colonial era. The emphasis on Sundanese women is derived from the abundance of news reporting that they resort to prostitution because of the inherent characteristics, such as laziness and fondness of luxury. This point of view, mostly seen through European eyes which put women, especially Sundanese women, into such a predicament. Therefore, there are three main problems to discuss in this article. First, it analyses European reports on Sundanese women and their relation with prostitution. Second, it showed the complexity of the practice of prostitution in a colonial country. Last, it discusses that prostitution was enabled by other material conditions such as urban development. It is important to note that the association with immorality on a certain ethnic group has always been rooted from the past. In addition, it reinforced on the assumption that prostitution is merely women's issue which can no longer be held.

Keywords: Colonialism, Prostitution, Sundanese Women, Sexuality, Urban Development

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara perempuan Sunda dan pelacuran di zaman kolonial. Penekanan pada perempuan Sunda didasarkan pada banyaknya berita yang menyebutkan bahwa perempuan Sunda banyak yang menjadi pelacur karena sifat-sifat buruk yang melekat dalam dirinya, seperti malas dan gemar hidup mewah. Pandangan yang banyak dioperasikan oleh orang Eropa ini sangat menyudutkan kaum perempuan, terutama perempuan Sunda. Atas dasar itu, artikel ini difokuskan untuk menganalisis tiga pokok masalah. Pertama, tulisan ini menganalisis laporan hasil pengamatan orang Eropa terkait perempuan Sunda dan hubungannya dengan pelacuran. Kedua, tulisan ini akan menunjukkan kompleksitas persoalan pelacuran dalam sebuah negara kolonial. Terakhir, tulisan ini juga akan menganalisis bahwa pelacuran juga dimungkinkan oleh kondisi material yang lain seperti perkembangan kota, misalnya. Artikel ini penting untuk ditulis untuk menunjukkan bahwa asosiasi sifat-sifat buruk terhadap satu etnis tertentu selalu memiliki akar di masa lalu. Selain itu, juga untuk pernyataan bahwa pelacuran hanya persoalan perempuan tidak lagi bisa dipertahankan.

Kata kunci : Kolonialisme, Pelacuran, Perempuan Sunda, Perkembangan Kota, Seksualitas

PENDAHULUAN

Persoalan pelacuran selalu identik dengan perempuan, mulai dari pelaku di lapangan sampai dengan subjek peraturan selalu menempatkan perempuan sebagai pusat

perhatian. Itulah mengapa perempuan kemudian mendapat konotasi yang buruk dan merupakan pihak yang paling disalahkan dalam praktik pelacuran.

Pandangan seperti ini juga berlaku pada masa kolonial. Dalam struktur masyarakat kolonial yang hierarkis berdasarkan perbedaan rasial, perempuan pribumi sering dianggap sebagai penyebab pelacuran karena rendahnya moral mereka. Keberadaan mereka juga tidak jarang dianggap sebagai ancaman bagi lelaki Eropa yang datang ke Hindia sebagai lajang, karena dianggap sebagai penyebab orang-orang Eropa berperilaku tidak bermoral (Jaelani, 2019). Selain ancaman moral, para pelacur juga merupakan ancaman karena bisa menyebarkan penyakit kelamin (Corbin, 1978).

Hubungan antara perempuan pribumi dengan keburukan moral itulah yang akan menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Pembahasan akan dilakukan dengan menganalisis bagaimana perempuan Sunda kerap diasosiasikan dengan sifat-sifat buruk seperti malas dan gemar hidup mewah yang kemudian membuat mereka menjadi pelacur. Cara pandang yang sangat menyudutkan perempuan ini, terutama perempuan Sunda, terlalu menyederhanakan kompleksitas persoalan pelacuran. Namun, dalam konteks kolonial, hal ini mudah dipahami, karena pemerintah selalu ingin menunjukkan sifat beradabnya dengan merendahkan bangsa lain.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Karena berkaitan dengan masa lalu, penelitian sejarah selalu dibangun berdasarkan jejak yang ditinggalkan. Sampai batas tertentu, sejarah, oleh karenanya, sering disebut juga sebagai pengetahuan yang didasarkan pada jejak. Jejak yang ditinggalkan bisa berupa dokumen, objek material atau bahkan lanskap sebuah kota (Veyne, 1979). Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini, pertama-tama, didasarkan pengamatan orang Eropa yang ditulis dalam bentuk catatan perjalanan seperti yang ditulis oleh Henri van Kol – *Uit onze koloniën: uitvoerig reisverhaal* (1903) – laporan penelitian tentang kehidupan penduduk Pribumi berjudul *Onderzoek naar de Mindere Welvaart* (1907 dan 1914). Yang terakhir ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan sejak tahun 1903 sampai dengan 1914, mencakup daerah Jawa dan Madura. Tulisan ini hanya menggunakan laporan-laporan yang berkaitan dengan persoalan sosial dan perempuan yang berasal dari Residensi Priangan. Pengamatan orang Eropa terkait persoalan perempuan Sunda dalam hubungannya dengan pelacuran juga didasarkan pada disertasi fakultas kedokteran berjudul *De syphilis in het Regentschap Bandoeng*, ditulis oleh Tio Biau Sing tahun 1941. Sekalipun ini merupakan disertasi di bidang kedokteran, ia juga memuat banyak informasi sosiologis terkait praktik pelacuran yang ada di Bandung.

Selain pengamatan orang-orang Eropa, tulisan ini juga didasarkan pada catatan kaum Pribumi. Karya sastra sezaman, yang ditulis oleh pengarang Sunda dalam bahasa Sunda seperti *Carios Agan Permas* karya Juhana bisa mengungkap pandangan-pandangan terhadap satu kelompok tertentu. Hal ini dipilih karena jenis karya sastra yang seperti itu lebih bisa merepresentasikan cara bagaimana kehidupan orang Sunda digambarkan, terutama kaum perempuannya. Selain karya sastra, laporan dari koran sezaman, seperti tulisan Anna Syarif dalam majalah *Bintang Hindia* juga dijadikan dasar.

Ketiga, lanskap kota Bandung sebagai kota pedalaman juga menjadi fokus analisis, karena kondisi material kota Bandung itu ikut mendorong perkembangan praktik pelacuran. Ini merupakan sebuah perspektif yang ditawarkan oleh Thomas J. Schlereth yang mengemukakan *above-ground archeology*. Ia merupakan sebuah cara kerja arkeologi yang tidak didasarkan pada penelitian yang terkubur, melainkan sesuatu yang nampak di permukaan, yakni kebudayaan material yang bisa dilihat dengan mata, sampai dengan lanskap sebuah kota. Meskipun memiliki penamaan berbeda seperti *environmental history*, *material culture studies*, *urban archeology*, *history under foot*, *nearby history*, *landschape archaeology*, tapi cara kerjanya sama, yakni menganalisis aspek historis dari objek material yang tampak di permukaan (Cotter, 1974; Goldfield, 1975; Schlereth, 1980). Dengan kerangka tersebut, artikel ini akan menganalisis prakondisi material yang memungkinkan maraknya praktik pelacuran di Bandung.

Penggunaan sumber Eropa dan Pribumi dalam penulisan artikel ini dilakukan untuk memberi gambaran yang seimbang bagaimana permasalahan ini dibahas pada masa itu. Begitu pula dengan lanskap kota Bandung untuk menunjukkan bahwa praktik pelacuran dimungkinkan karena kondisi material kota tertentu. Perlu disampaikan bahwa pandangan orang Eropa tidak selalu bernada negatif, seperti halnya pandangan orang Pribumi juga tidak selalu positif. Prasangka-prasangka yang terdapat dalam cara pandang tidak selalu berhubungan dengan ras, tetapi juga dengan persoalan kelas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang pelacuran di Bandung pada masa kolonial akan difokuskan pada tiga pokok persoalan utama yang akan dianalisis dalam kaitannya dengan upaya untuk mempertanyakan kembali prasangka-prasangka yang cukup umum pada masa kolonial – yang bisa jadi masih berlaku sampai hari ini – terkait hubungan antara perempuan sunda dengan praktik pelacuran. Pada bagian pertama akan dibahas citra perempuan sunda yang gemar bersolek yang pada masa itu dianggap sebagai penyebab mereka menjadi perempuan pelacur. Sebagai kritik terhadap cara pandang itu, bagian kedua akan membahas bagaimana praktik pelacuran harus selalu dihubungkan dengan cara bagaimana seksualitas dipandang dalam masyarakat. Terakhir, untuk menguatkan argumen yang disampaikan di bagian kedua, artikel ini akan menganalisis praktik pelacuran sebagai bagian dari fenomena urban.

Perempuan Pesolek

Haryoto Kunto, yang sampai sekarang dikenal sebagai kuncen Bandung itu, bercerita tentang lirik lagu yang sering dinyanyikan di sekolah-sekolah sekitar tahun 1930-an. Demikian disebutkan:

*De meisjes van Bandoeng
Heft veel moeite te doen
Om haar gezicht mooi te maken
Om gekozen te zijn
Maar wat haar hart betreft
Dat is toch heel heel slecht*

*Want zij wilt niet trouw blijven
Als je geen geld meer hebt
Dat is de liefde der Bandoengster*

Ref *Glorie glorie Gloria
Zwart zijn de meisjes van Batavia
Glorie glorie glorie Gloria
De meisjes van Batavia zijn zwart pikzwart*¹ (Kunto, 1984, p. 139)

Ada jarak lima puluh tahunan dari saat nyanyian itu populer sampai dengan informasi tentang popularitasnya disampaikan. Sang penulis sayangnya tidak menyebutkan rujukan yang ia pakai ketika menceritakan itu. Ada dua kemungkinan dari mana ia mendapat informasi itu. Pertama, jejak-jejak material, seperti buku-buku, majalah, koran, dan pemutar musik. Ini sangat mungkin, mengingat ia juga memiliki koleksi yang berlimpah yang berasal dari periode kolonial. Kedua, tradisi lisan atau cerita-cerita yang pernah ia dengar dari orang-orang tua yang pernah mengalami hidup di zaman kolonial.

Untuk memastikan bahwa lirik lagu yang mendeskripsikan perempuan Bandung – yang sampai batas tertentu juga dimaknai sebagai perempuan Sunda – benar seperti itu, yang paling mungkin dilakukan adalah memeriksa koleksi dokumen yang dimiliki oleh sang kuncen Bandung. Penelusuran cerita-cerita sezaman hanya kecil kemungkinan bisa dilakukan, mengingat mereka yang masih hidup jumlahnya sangat sedikit, dan di antara yang sedikit itu juga ingatannya sudah kurang baik. Meskipun demikian, ada jalan ketiga sebagai alternatif untuk mengonfirmasi kesahihan informasi yang terdapat dalam lirik lagu tadi, yaitu membandingkan dengan informasi-informasi sezaman terkait persoalan ini, seperti catatan perjalanan Henri van Kol, seorang anggota parlemen Belanda, misalnya.

Pada hari Jumat tanggal 11 April 1902, Van Kol tiba di Karesidenan Priangan. Kunjungan ini merupakan bagian dari perjalanannya berkeliling Hindia Belanda, untuk mengetahui kondisi sesungguhnya di tanah jajahan ini. Itulah mengapa ia juga menegaskan dalam catatan perjalanannya bahwa ia tidak akan membicarakan orang-orang, tapi kondisi sosial ekonomi penduduk di sana, yang darinya ia bisa menarik kesimpulan (Kol, 1903, p. 3). Pernyataannya ini tentu saja berkaitan dengan kepentingan dirinya sebagai anggota parlemen Belanda dari partai sosialis; ia membutuhkan data untuk dijadikan dasar argumentasi di parlemen.

Bandung yang pernah ia kunjungi lima belas tahun sebelumnya menjelma menjadi kota yang tak lagi dikenali. Ada banyak hal yang telah berubah di awal abad ke-20 ini seperti bangunan-bangunan baru berdiri, jalur kereta api telah ramai, dan jalanan dibangun lebar. Kunjungan pertama di kota ini dilakukan ke sebuah rumah sakit umum di tengah kota. Bangunan yang terletak di tengah kota ini sebetulnya memiliki konstruksi yang buruk. Di dalamnya, ia menemukan banyak penderita kolera dirawat secara tidak

¹ Perempuan Bandung/ Akan melakukan apa saja/ Untuk mempercantik wajahnya/ Namun hati mereka jelek/ Sebab mereka takkan tetap setia/ Bila kau tak lagi punya uang. Itulah cintanya orang Bandung/ Glori glori gloria/ Hitam cewek-cewek dari Jakarta/Glori glori gloria/ Cewek dari Jakarta pada hitam hitam legam

layak, begitu pula dengan para penderita cacar. Namun, apa yang menarik perhatiannya adalah, di sebuah pojok terdapat sebuah ruangan yang dikelilingi oleh kawat dan tanpa ketersediaan air bersih, di dalamnya dipergunakan untuk merawat lima puluh dua pelacur. Mereka adalah para penderita sifilis yang dikirim dari tangsi militer di Cimahi (Kol, 1903, p. 577).

Para penderita penyakit kelamin cukup mendapat perhatian Tuan Van Kol, penderita selain kolera, cacar, dan lepra, yang ia rekam dalam catatan perjalanannya. Sumber dari penyebarannya adalah pelacuran. Dalam uraiannya tentang tangsi militer di Cimahi, ia mengatakan bahwa di daerah sekitar tangsi terdapat tempat pelacuran. Para serdadu Eropa yang tertular penyakit ini umumnya adalah mereka yang hidup tanpa *huishoudster*, yang berarti pembantu, tapi bisa juga diartikan sebagai gundik (Kol, 1903, p. 586).

Dalam pengamatannya terkait kondisi sosial-ekonomi penduduk Priangan, ia juga menyinggung persoalan pelacuran. “Bagaimanapun, pelacuran sangat umum di sana, terlepas dari kenyataan bahwa para perempuan [di sana] menikah muda, tapi hasrat bawaannya dan keinginan untuk menjadi kaya menumbuhkan kelonggaran moral ini”, tulisnya (Kol, 1903, p. 604). Demikian, perkawinan di usia kanak-kanak merupakan salah satu penyebab praktik pelacuran. Namun lebih dari itu, ia juga mengatakan bahwa dalam diri perempuan Sunda, sudah ada sifat selalu ingin memiliki barang-barang bagus dan uang, yang dibawa sejak lahir, dan itulah yang membuat standar moral jadi lebih longgar untuk mereka.

Pengamatan Tuan Van Kol ini bisa dibandingkan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kondisi sosial ekonomi penduduk Jawa dan Madura. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 1902 pemerintah kolonial sudah menyiapkan panitia untuk melakukan penelitian terkait persoalan kemiskinan yang terus menerus terjadi di tanah jajahan. Upaya ini juga merupakan respons atas pidato Ratu Belanda yang, sampai batas tertentu, kerap ditandai sebagai awal dari zaman baru di Hindia. Panitia penelitian ini kemudian diberi nama *Mindere Welvaarts Onderzoek*, Penyelidikan tentang Berkurangnya Kesejahteraan, sebuah istilah yang dihaluskan secara politis untuk menunjukkan kondisi masyarakat di tanah jajahan (Boomgaard, 1986; Husken, 1994).

Penyelidikan ini dilakukan dengan menyebarkan angket, terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai persoalan. Seorang agen diutus ke daerah-daerah tertentu untuk penyelidikan ini. Salah satu persoalan yang ditanyakan adalah tentang keberadaan pelacuran di daerah-daerah yang diteliti, seperti: “ada banyakkah praktik pelacuran? Apakah jumlahnya meningkat? Apa penyebabnya?”.

Laporan penelitian dari Karesidenan Priangan, terutama dari kota Bandung, menyebutkan bahwa ada banyak pelacuran dan jumlahnya meningkat. Laporan yang terbit tahun 1907 ini menunjukkan bahwa angka pelacur di kota ini mengalami peningkatan. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini, tapi di laporan itu juga disebutkan bahwa perempuan Sunda kurang berkembang intelektualnya karena mereka lebih bertindak menggunakan perasaan ketimbang akal. Ini tentu saja sebuah pernyataan yang penuh prasangka. Apalagi, laporan itu juga kemudian menyebutkan bahwa karena hal itu,

perempuan Sunda kemudian memiliki sifat pemalas yang membuat mereka tidak mau susah bekerja dan mengurus rumah tangga. Umumnya, para perempuan ini kemudian menjadi pelacur setelah bercerai dan menjadi janda. Di atas semua itu, laporan ini juga menyebutkan bahwa perempuan Sunda sangat menyukai pakaian bagus. Mereka, secara alami, memiliki hasrat yang seperti itu. Sebuah firma di Batavia menyebutkan bahwa perempuan Sunda adalah konsumen terbaik mereka. Menurut laporan ini, hanya dengan menjadi pelacur lah kebutuhan itu bisa terpenuhi (*Onderzoek Naar de Mindere Welvaart: Samentrekking van de Afdeulingsverslagen over de Uitkomsten Der Onderzoekingen Naar de Economie van de Desa in de Residentie Preanger-Regentshappen*, 1907, pp. 34–35). Demikian, laporan ini menegaskan bahwa hasrat bersolek para perempuan Sundalah yang membuat mereka kemudian memilih untuk menjadi pelacur.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh komisi yang sama, terbit tahun 1914, alasan kemunculan pelacuran disampaikan dengan lebih tegas: “kesombongan, cinta pakaian yang indah, dan gairah yang besar” (*Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera. IXb3: Verheffing van de inlandsche vrouw*, 1914, p. 18). Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini jelas sangat merendahkan perempuan sebagai satu-satunya faktor terjadinya pelacuran. Di dalam pernyataan itu juga jelas ada prasangka kolonial yang selalu meletakkan perempuan pribumi sebagai cabul. Namun, satu hal yang tidak bisa dilewatkan adalah kenyataan bahwa gagasan tentang perempuan Sunda yang gemar bersolek dipercaya banyak orang pada saat itu.

Perlu disampaikan bahwa sekalipun komisi ini terdiri dari orang-orang Eropa, penelitian lapangan dilakukan oleh agen-agen Pribumi, para pejabat lokal di daerahnya masing-masing. Adapun yang diwawancara adalah juga para pejabat lokal di tingkat yang lebih rendah, seperti kepala desa misalnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, bukan tidak mungkin anggapan terkait perempuan Sunda yang gemar bersolek yang kemudian menyebabkan mereka menjadi pelacur, juga hidup dalam pikiran para lelaki Pribumi. Perlu juga digarisbawahi bahwa cara pandang pejabat Pribumi juga tidak lepas dari bias patriarki yang membuat mereka memiliki pandangan bahwa perempuanlah yang salah, bukan laki-laki.

Terkait pandangan yang mendiskreditkan perempuan sunda bisa juga dibaca dalam sebuah artikel yang terbit di majalah *Bintang Hindia*. Seorang penulis perempuan bernama Anna Syarif menulis hasil pengamatannya terkait perempuan Sunda. Dalam pandangannya, perempuan Sunda memiliki sifat buruk yang mewujud dalam perilaku hidup mewah dalam kesehariannya. Mereka menyukai pakaian-pakaian bagus, perhiasan, dan hidupnya hanya ingin bersenang-senang saja. Tentang pakaian, perhiasan, dan gaya hidup bersenang-senang perempuan Sunda cukup terkenal pada awal abad ke-20. Bahkan sebagian besar di antara mereka berpikir, “*meskipun tak makan tjoekoep, tak mengapa asal mereka dapat berpakaian bagoes*”. Tentang perhiasan mahal, Syarif melanjutkan, “*istri bangsa Soenda tak memerlukan, hanja seolah-olah benda-benda jang palseo-palseo jang moerah harganja tetapi merkaitoe dapat mengatoer*” (Syarif, 1924, p. 223).

Keberadaan pelacuran pun muncul dari perilaku semacam itu. Sebab untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka tidak selalu mendapatkan uang, dan karenanya

pelacuran sering menjadi pilihan. Apalagi perempuan Sunda pun terkenal “*soeka kereseikan, tjantik-tjantik soeka berhias, dan adatnya lemah-lemboet perkata’annja lemas, hingga dapat merajoekan hati laki-laki*” (Syarif, 1924, p. 224).

Sebagai seorang kolumnis, Anna Syarif kerap mengangkat isu-isu perempuan dalam tulisan-tulisannya. Pandangannya terkait perempuan Sunda bisa jadi memang merefleksikan kenyataan pada masa itu, dan ia menulisnya tanpa prasangka. Di satu sisi, ia juga melihat perempuan Sunda yang gemar berdandan sebagai sesuatu yang positif karena berkaitan dengan cara bagaimana seorang perempuan menghargai tubuhnya; di sisi lain, ia juga melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang negatif karena menjadi penyebab terjerumusnya kaum perempuan ke dalam pelacuran.

Gambaran tentang perempuan Sunda bisa juga dibaca dalam novel autobiografis E. Du Perron, *Country of Origin*, terbit tahun 1935. Pada bagian yang menceritakan kehidupan masa muda sang narator yang dihabiskan di Bandung, ia mengatakan bahwa “*Sundanese women are praised for their sexual talents, particularly by planters, but I found them without exception to be cool and chaste toward Europeans. They became affectionate only when the persèn was brought up. If anything, their erotic behavior was the opposite of passionate; they seemed to keep up a maximum of feminine dignity in the face of the enemy*” (Du Perron, 1999, p. 266). Ada dua hal yang disampaikan dalam pengamatan ini. Pertama, perempuan Sunda cukup dikenal – setidaknya dalam pandangan orang Eropa dan Indo-Eropa – sebagai sensual; kedua, pelayanan maksimal yang diberikan oleh perempuan Sunda hanya akan terjadi kalau ada bayaran uang.

Sampai di sini, catatan mereka yang mengamati persoalan pelacuran di Priangan, khususnya di Bandung, selalu mengaitkan kemunculannya dengan perilaku perempuan Sunda yang gemar bersolek. Pandangan ini tentu saja mendiskreditkan perempuan Sunda itu sendiri, seolah-olah praktik pelacuran merupakan sesuatu yang terjadi karena unsur-unsur yang melekat pada mereka. Oleh sebab itu, perlu disampaikan sebuah catatan dari penulis perempuan lain, Ch. Sj. Datoe Toemenggoeng, seorang Minangkabau yang tinggal di Batavia dan kerap menulis untuk *Pedoman Istri*, yang menerbitkan sebuah artikel pada tahun 1936 berjudul “Bestrijding van den Vrouwenhandel”, dalam kumpulan tulisan yang diedit oleh M. A. E. Van Lith-van Seegreven dan J. H. Hoykaas-van Leeuwen Boonkamp (eds.) berjudul *Indische Vrouwenjaarboek*. Di dalam artikel tersebut, ia mengatakan bahwa kecintaan terhadap barang-barang dan pakaian yang bagus merupakan salah satu yang membuat perempuan jatuh ke dalam dunia pelacuran. Dan itu tidak hanya berlaku secara spesifik bagi perempuan Sunda, melainkan perempuan secara umum (Toemenggoeng, 1936).

Lebih dari itu, pernyataan bahwa hasrat bersolek dan memiliki barang-barang bagus sebagai penyebab dari praktik pelacuran juga perlu dipertanyakan lebih jauh. Ia tidak berdiri sendiri, tapi harus dilihat dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain, seperti pandangan tentang seksualitas dan perkembangan sebuah kota misalnya.

Pandangan terhadap Seksualitas: Poligami, Selir, dan Ronggeng

Pada tahun 1941 Tio Biauw Sing mempertahankan sebuah disertasi di sekolah kedokteran Batavia, STOVIA, dengan judul *De syphilis in het regentschap Bandoeng*. Seorang calon dokter menulis tentang persoalan penyakit sifilis di daerah Bandung. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Sebagai salah satu penyakit yang cukup banyak menyebar sejak pertengahan abad ke-19 – setidaknya ketika penyakit ini sudah mulai banyak direkam dalam catatan orang-orang Eropa (Jaelani, 2013) – wajar saja kalau seorang calon dokter kemudian mengkajinya.

Meskipun fokus dari penelitiannya adalah penyakit kelamin dari sudut pandang kedokteran, tapi penelitian ini juga mengulas penyebab penyebaran penyakit kelamin itu sendiri, yakni praktik pelacuran dan seksualitas yang longgar. Tio menunjukkan “kenyataan bahwa di setiap tempat bisa terdapat banyak tempat pelacuran disebabkan oleh toleransi besar orang Sunda terhadap perempuan publik (pelacur)”. Ia juga menunjukkan bahwa mudahnya profesi ini dan keinginan untuk hidup mewah telah menjadi alasan kenapa perempuan Sunda memilih menjadi pelacur. Para perempuan itu, ketika kemudian menjadi pelacur, mereka melakukannya dengan berpindah ke kota (Tio, 1941, p. 66).

Temuan sang dokter menunjukkan bahwa praktik pelacuran sedikit banyak disebabkan oleh pandangan terhadap seksualitas yang longgar. Tentu saja hal ini juga bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Para pelaut Eropa yang datang pertama kali ke Nusantara dibuat kaget dan jengah oleh kehidupan seksualitas penduduknya karena kehidupan seksualitas penduduk Nusantara dianggap telah melampaui batasan moral yang dianut oleh para pelaut tersebut. Misalnya mereka melihat, perkawinan sebagai aktivitas jual beli perempuan dan penuh pengorbanan. Kemudian perceraian begitu mudah dilakukan, bahkan oleh seorang perempuan. Dan hubungan seksual pranikah bukan sesuatu yang tabu (Reid, 2014). Kebiasaan semacam itulah yang telah mengganggu para pelaut Eropa itu. Barangkali dalam pikiran mereka tumbuh keyakinan betapa penduduk Nusantara kurang beradab, dan bisa jadi dasar seperti itu di kemudian hari dijadikan dasar untuk melegitimasi keberadaan mereka di Nusantara. Terkait hal ini, seorang pelancong Eropa mengatakan bahwa orang Jawa sebagai “sangat penuh birahi, pria maupun wanitanya”, mereka melakukan aktivitas cabul dari gerakan, perkataan, dan pikiran, dan apa yang ada di kepala penduduk Nusantara hanya seks (Reid, 2014, p. 176).

Ketakjuban para pelancong itu sebetulnya sangat wajar terjadi. Semua itu dimungkinkan karena nilai-nilai seksualitas yang diimani oleh para pelancong Eropa berbeda dengan yang dianut oleh para penduduk Pribumi. Hubungan seksual yang dipandang cabul dalam pengertian moral orang Eropa, bagi orang Jawa dipahami layaknya kebutuhan manusia sehari-hari seperti makan dan minum yang harus dinikmati setinggi-tingginya (Onghokham, 1991, p. 21). Dalam norma orang Jawa tadi, hubungan seks telah menjadi simbol kesuburan bumi, dan sebagai salah satu bentuk pemujaan terhadapnya, banyak candi, relief, atau patung yang menggambarkan hubungan seksual dibangun.

Barangkali itulah sebabnya persoalan seksualitas tidak pernah menjadi sesuatu yang serius, dan tidak pernah menyentuh persoalan moral karena semua itu dianggap sebagai sesuatu yang alami. Dalam masyarakat dengan cara pandang terhadap seksualitas semacam itulah pelacuran bisa tumbuh subur. Bahkan pada awal abad ke-20, praktik pelacuran mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Bandung. Sebagai kota pedalaman², tentu saja hal ini sedikit mengejutkan, dibandingkan dengan pembicaraan pelacuran di Jakarta, Surabaya, atau Semarang yang keberadaannya sebagai kota pelabuhan sangat mendukung itu. Namun, pengalaman Bandung sebetulnya sangat mudah dipahami dengan melihat perkembangan kota ini sejak akhir abad ke-19, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian terakhir.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa praktik pelacuran di Bandung hanya baru muncul setelah pembangunan kota. Untuk memberi kejelasan tentang itu, perlu diberi gambaran awal tentang hal-hal apa saja yang telah mendorong peningkatan praktik pelacuran di Bandung. Untuk itu, pada bagian ini terutama akan didiskusikan lebih jauh tentang praktik seksualitas masyarakat Priangan. Praktik seksualitas itu sendiri lebih difokuskan pada tradisi poligami dan konkubinsi atau pergundikan di kalangan menak Priangan. Setelah itu akan dibicarakan soal kesenian ronggeng. Pembicaraan ini sangat penting sebab kesenian ini sering diidentifikasi sebagai praktik pelacuran terselubung.

Poligami dan Selir

Praktik perkawinan yang umum dilakukan di Asia Tenggara adalah monogami, dengan beberapa pengecualian untuk kalangan raja dan para elite Pribumi. Bagi kelompok terakhir, perkawinan poligami lebih lazim dilakukan, bahkan menjadi sesuatu yang khas mereka sebab bagi mereka memiliki istri banyak merupakan pertanda status dan sebagai senjata diplomasi (Reid, 2014, p. 174). Kebiasaan para raja dan elite ini juga didukung oleh kebiasaan kalangan bawahan yang gemar menawarkan anak-anak gadis mereka untuk dijadikan istri raja atau selir sebagai semacam upeti suatu tindakan penghormatan dan sebagai sumpah kesetiaan.

Pada kaum menak Priangan, poligami juga dilakukan dengan motivasi yang tidak jauh berbeda dengan yang umum dilakukan oleh para elite di Asia Tenggara. Prabu Siliwangi, misalnya, sebagaimana disebutkan dalam *Babad Padjadjaran* dan *Sadjarah Galuh*, memiliki 151 istri. Sementara itu *Babad Limbangan* menyebutkannya lebih dari 100 orang (Lubis, 1998, p. 232). Beristri banyak bagi seorang raja seperti Prabu Siliwangi tampaknya lebih berfungsi sebagai siasat politik. Pernikahan semacam itu lebih dilakukan sebagai alat kontrol kerajaan yang terlalu luas, dengan mendekatkan pihak-pihak yang luas itu dalam satu ikatan keluarga.

² Pada masa kolonial, orang Eropa kerap membagi kota menjadi pesisir dan pedalaman, pembagian yang salah satunya didasarkan pada alasan kesehatan. Kota pedalaman yang juga bisa disebut sebagai kota pegunungan memiliki suhu udara yang lebih sejuk dan karenanya lebih sehat dibandingkan dengan kota-kota yang terletak di pesisir (Jaelani, 2017).

Praktik semacam itu masih dilakukan oleh para menak pada abad ke-19. Percobaan pembunuhan terhadap R. Adipati Aria Martanegara yang direncanakan oleh sekelompok menak Bandung, membuat hubungan bupati keturunan Sumedang ini dengan kalangan menak Bandung menjadi retak. Untuk memperbaiki hubungan ini, Bupati Martanegara kemudian menikahkan anak laki-lakinya, Raden Martahadisuria, dengan Raden Kustoniah, keponakan Bupati Bandung terdahulu yang sudah meninggal. Selain itu ia juga menikahkan putrinya R.A. Sankaningrat dengan R.A.A. Wiranatakusumah. Perkawinan politik semacam ini juga pernah dilakukan oleh R. Jamu (Pangeran Kornel) yang menikahi putri keturunan Parakan Muncang karena bupati tersebut sedang menyelangi menjadi bupati di Sumedang (Lubis, 1998, p. 234).

Selain sebagai siasat politik, poligami dan konkubinasi juga merupakan simbol gaya hidup hedonis para menak Priangan. Jumlah istri dan selir yang mereka miliki bisa mencapai enam puluh bahkan hingga ratusan. Istri dan selir dalam jumlah banyak itu merupakan penghibur hati sebab gaya hedonis itu sendiri memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kaum menak. Hedonisme kaum menak itu juga sering diidentikkan dengan perempuan. Dengan gaya hidup demikian, kehidupan menak bagaikan *gateuw* (rayap) yang pekerjaannya hanya seputar kesibukan di kabupaten, bermain serimpi, bedaya, wayang orang, dan bersenang-senang dengan istri dan selir-selir sebagai penghibur (*Poesaka Soenda* dalam Lubis, 1998, p. 234).

Pemilikan istri dan selir dalam jumlah banyak juga menunjukkan status sosial, bahwa seorang menak kemudian berkuasa atas apa saja. Jumlah istri dan selir yang dimiliki menjadi simbol seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Kenyataan semacam itu telah membentuk paradigma bahwa seorang menak bukan sembarang orang.

Pikiran tentang kedudukan menak sebagai orang yang luar biasa membuat banyak orang berlomba-lomba untuk mendapat kemuliaan darinya. Untuk itu, terutama bagi perempuan-perempuan *cacah*, menjadi *garwa leutik* ataupun selir, adalah dambaan. Mereka berharap dengan itu, status mereka sebagai *cacah* bisa meningkat. Peningkatan status ini juga tidak hanya berlaku bagi si perempuan saja, melainkan keluarganya juga. Keadaan ini pula yang membuat para orang tua berharap anak-anak perempuannya diambil istri atau selir oleh para menak.

Kalau seorang menak sedang turun ke desa, kemudian ia bertemu dengan seorang perempuan cantik, maka perempuan itu sering dimintanya untuk dijadikan istri atau selir. Keluarga perempuan tadi tentu saja tidak bisa menolak karena memang menak berkuasa atas segalanya. Meskipun demikian, keluarga tersebut bangga karena akan menjadi “keluarga” menak. Hanya saja tidak semuanya berlaku demikian. Ada juga keluarga yang keberatan sehingga perlu menyembunyikan anak perempuannya yang cantik bila menak datang.

Hal-hal tadi banyak direkam dalam karya-karya sastra tradisional maupun modern. Jika dalam karya sastra tradisional lebih banyak diceritakan kehidupan di kalangan istana atau para menak, dalam karya sastra modern kehidupan masyarakat luas lebih mendapat perhatian. Ini juga sering kali dilihat sebagai sebab penderitaan perempuan Sunda. Dalam *Carios Agan Permas* (Juhana, 1996), misalnya, disebutkan

tentang seseorang bernama Imas yang menjadi seorang Nyai. Dalam cerita tersebut, menjadi Nyai itu merupakan akibat paling akhir dari rangkaian penderitaan yang buruk itu. Pangkal persoalannya adalah Haji Serbana yang berlaku sebagai lintah darat, dan mau mengambil keuntungan dari Bapa Imba, dengan mengambil anak perempuannya, Imas, yang sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Imas diculik, diperkosa, dan kemudian diusir. Nasib buruk Imas berakhir karena dia diselamatkan oleh Tuan Kawasa perkebunan yang menjadikannya seorang Nyai. Setelah itu kehidupan Imas pun menjadi baik. Pada titik ini, orang Belanda cenderung membantu.

Praktik pernikahan yang tadi saya sebutkan menunjukkan jika etika seksualitas yang dianut oleh masyarakat Sunda masih sangat longgar. Selain itu, kedudukan perempuan yang diposisikan rendah dalam struktur masyarakat patriarkal yang membuatnya tidak lebih seperti barang dagangan yang bisa diperjualbelikan juga ikut menjadi prakondisi adanya praktik pelacuran. Lebih dari itu, keberadaan pelacuran juga harus dilihat dalam hubungannya dengan hal lain, seperti tradisi ronggeng misalnya.

Ronggeng

Tarian ronggeng merupakan tradisi yang sudah berjalan cukup lama. Tercatat sejak masa Kerajaan Sunda tarian ini sudah menjadi pertunjukan istana yang hanya dilangsungkan di sana. Penyelenggaraannya di istana terkait erat dengan ritual pemujaan kesuburan (Sujana, 2002, p. 1). Keadaan yang demikian terjadi karena menurut kepercayaan lama, ronggeng itu pada mulanya merupakan penari *shaman* dalam *shamanisme* ("Prostitutie," 1902, p. 342; Suharto, 1980, pp. 41–42; Sujana, 2002, p. 4). Seorang ronggeng dipercaya bahwa pada dirinya ada unsur daya magis. Kegiatan menari dengan pria dimaksudkan untuk mendapat *magi-simpatetis*, yaitu semisal kekuatan tidak kasat mata yang dimaksudkan untuk memuja kesuburan (Sujana, 2002, p. 2).

Ronggeng dibicarakan dalam bagian ini karena dalam pandangan orang Eropa merupakan sebuah praktik pelacuran. Raffles secara tegas menyebutkan dalam karya etnografinya bahwa ronggeng sejenis dengan pelacuran yang umum ditemuinya di Eropa. Mungkin Raffles hanya salah satu contoh saja, tapi paling tidak bisa sedikit mewakili cara pandang Eropa terhadap ronggeng. Pada tahun-tahun berikutnya pandangan bahwa ronggeng identik dengan pelacuran semakin dilembagakan. Dalam peraturan tentang pelacuran tahun 1874, ronggeng merupakan salah satu yang dikenai peraturan itu. Pemerintah mengatakan bahwa "ronggeng atau penari yang hanya beroperasi sekali-kali, mereka harus menjadi anggota kelompok rumah bordil" (*Arsip Nasional Indonesia*, 2001, p. 8). Pernyataan tersebut sangat jelas, dan karenanya, para ronggeng ini diminta untuk bergabung dengan salah satu rumah bordil tertentu untuk memudahkan pengawasan. Kemudian, dalam publikasi resmi, semisal *Encyclopedie van Nederlandsch Indie* ("Prostitutie," 1902, p. 342; "Prostitutie," 1919, p. 511), ronggeng juga diidentifikasi sebagai pelacuran yang khas Hindia. Dalam edisi yang terbit pada 1902 disebutkan bahwa "pelacuran terdapat di seluruh Hindia, terutama di Jawa, umumnya terbagi menjadi empat jenis: Ronggeng Jawa dan Balian Borneo; pelacur profesional (*beroepsprostitutie*); perempuan serdadu; dan pengurus rumah tangga". Dalam publikasi

tersebut, ronggeng menempati urutan pertama praktik pelacuran yang ada di Hindia. Dalam edisi yang terbit pada 1919, ronggeng juga masih dikategorikan sebagai praktik pelacuran. “Pelacuran bisa dibagi menjadi pelacur profesional dan kelas khusus perempuan yang tidak hanya pendeta perempuan, penari, dan penyanyi tapi juga pelayan venus” (“Prostitutie,” 1919, pp. 511–512). Pengelompokan pemerintah sedikit mengalami pergeseran. Meskipun demikian, ronggeng masih tetap dikelompokkan sebagai bentuk pelacuran sebab di bagian lain dalam tulisan itu pemerintah mengatakan bahwa “selain pelacur profesional, yang banyak orang temui di Jawa, terdapat juga kelompok pelacuran yang lain seperti taledok (Jawa), ronggeng (Sunda), Pedjoge, Balian (Dayak)”. Demikian, sekalipun ada pergeseran, pandangan pemerintah terhadap ronggeng masih tetap sama; bahwa ronggeng adalah pelacur.

Pada 19 Februari 1901 forum “Indische Genootschap” mengambil tema “Prostitutie in Nederlandsch-Indië” (Kohlbrugge, 1901). Dalam pertemuan orang-orang Belanda yang berpikiran liberal ini, Kohlbrugge, seorang dokter dan psikiatri memulai pidato terkait persoalan pelacuran di Hindia Belanda. Pidato ini juga menjadi indikator sebuah perubahan nilai moral yang sedang terjadi. Kalau sebelumnya praktik pelacuran dianggap biasa saja, memasuki awal abad ke-20, keberadaannya dianggap sebagai sebuah ancaman moral. Dalam pidato ini, ia juga memulai uraiannya dengan menyampaikan bentuk pelacuran yang sudah diakui oleh pemerintah, yakni ronggeng. Jelas, dari apa yang ia sampaikan, keberadaan ronggeng masih dipandang sebagai praktik pelacuran.

Memang di dalam pertunjukan ronggeng bisa jadi ada unsur-unsur yang dikategorikan Raffles atau Pemerintah Hindia sebagai pelacur. Namun menyamakan ronggeng dengan praktik pelacuran sepertinya terlalu menyederhanakan masalah. Ronggeng, menurut Boomgard harus dilihat dengan cara “membandingkannya dengan *geisha* di Jepang atau aktris Eropa yang memberi hiburan, sesuka mereka, untuk kebahagiaan segelintir orang, yang memberi hadiah kepada mereka” (Boomgaard, 2004, p. 283). Ronggeng menurutnya merupakan “profesi yang menuntut bakat dan inspirasi yang istimewa, dengan keanggotaannya berkisar dari mulai pelacur yang ingin mencari penghasilan tambahan dengan menari dan menyanyi pada pesta perkawinan seorang petani, sampai artis yang terampil, yang menyuguhkan pertunjukan mereka bagi kaum ningrat”. Holt juga menyebutkan bahwa sekalipun dianggap sebagai pelacur “mereka tidak pernah dianggap rendah atau mengalami perlakuan penyalahgunaan itu. Mereka bahkan bisa menikah dengan anggota masyarakat terhormat” (Holt, 2000, p. 140).

Hanya saja pandangan umum yang berlaku pada masa itu adalah identifikasi ronggeng dengan pelacur desa. Karena itu, keberadaan ronggeng pun pernah dianggap sebagai sebuah gangguan. Pemerintah kolonial pernah melarang penyelenggaraan pesta ronggeng pada 1778, kecuali ada persetujuan dari pemilik perkebunan swasta. Bisa jadi larangan tersebut berkait dengan banyaknya kerugian yang diperoleh oleh pihak perkebunan dengan adanya pesta semacam itu. Peraturan itu kemudian dipertegas lagi 22 tahun kemudian dengan adanya larangan tanpa syarat untuk semua pertunjukan ronggeng. Peraturan ini ternyata sangat merugikan para pemilik perkebunan sebab para bujang yang tidak dapat menikmati hiburan ronggeng secara periodik mengancam akan meninggalkan

perkebunan. Itulah sebabnya pada 1801 kembali diberikan pengecualian bagi perkebunan-perkebunan untuk menyelenggarakan pesta ronggeng. Namun peraturan itu tidak bertahan lama, beberapa bulan kemudian peraturan itu ditarik kembali. Baru pada 1807 ada pembatasan baru terhadap praktik ronggeng ini (Boomgaard, 2004, p. 283).

Kekhawatiran pemerintah dan pemilik perkebunan tampak jelas dalam persoalan ronggeng ini. Mereka dihadapkan pada dilema antara yaitu menjaga moral atau kehilangan tenaga kerja. Semua itu dimungkinkan karena identifikasi ronggeng dengan pelacur yang pada masa itu sinonim dengan pelacur desa. Identifikasi itu dilakukan untuk membedakan antara pelacuran pelabuhan dan garnisun. Padahal sebetulnya pelacur desa dan ronggeng merupakan dua entitas yang berbeda, tentu saja. Di tanah Priangan sendiri pada paruh awal abad ke-19 kategori pelacur desa yang sesungguhnya juga sudah ada. Keberadaan mereka telah menyebabkan para lelaki di Priangan menunda pernikahan (Boomgaard, 2004, p. 282). Hanya saja jumlah mereka belum banyak, dan keberadaannya lebih banyak tertutup oleh praktik ronggeng yang lebih umum dapat ditemui.

Pelacuran sebagai Fenomena Perkotaan

Sebetulnya pelacuran dalam pengertian yang modern adalah suatu fenomena perkotaan. Kehadiran para pelacur itu sejalan dengan pertumbuhan sebuah kota. Bandung tidak merupakan pengecualian tentu saja sebab persoalan pelacuran di Bandung sangat erat dengan pertumbuhan kota ini sejak akhir abad ke-19. Tata kota Bandung yang jejaknya masih tampak saat ini menjadi prakondisi material sebuah kehidupan yang memungkinkan praktik pelacuran berkembang.

Perlu disampaikan bahwa terbentuknya komunitas urban di Bandung itu sendiri tidak terlepas dari keberadaan perkebunan. Kehadiran perkebunan telah memungkinkan dibukanya jalur-jalur transportasi yang pada mulanya dimaksudkan untuk kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan. Namun akibatnya ternyata melampaui tujuan awal; pembukaan jalur transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan ke Bandung atau dari Bandung.

Keberadaan stasiun kereta di Bandung merupakan titik berangkat dari perkembangan kota Bandung. Banyak penduduk dari berbagai daerah datang dan pergi ke Bandung. Waktu tempuh yang singkat dengan transportasi kereta ini mempertinggi jumlah penduduk yang datang dan pergi ke kota Bandung. Meningkatnya jumlah pelancong memacu pertumbuhan layanan jasa penginapan, seperti hotel dan losmen. Rumah penginapan itu pada mulanya banyak dibangun di sekitar stasiun. Hal itu dapat dipahami karena pada mulanya rumah penginapan itu dibangun untuk memfasilitasi para penumpang kereta yang bingung mencari tempat menginap ketika datang ke Bandung di malam hari. Selain itu keberadaan stasiun Bandung sebagai tempat pergantian lok dalam perjalanan Jakarta-Surabaya sering kali mengharuskan para penumpangnya menginap semalam di Bandung (Hardjasaputra, 2002, p. 219).

Stasiun kereta api yang dibangun pada akhir abad ke-19 sampai saat ini masih berdiri di pusat kota Bandung. Keberadaannya menjadi artefak yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan kota Bandung. Dalam kaitannya dengan praktik pelacuran, stasiun

kota Bandung juga pusat tempat berkembangnya hal tersebut. Ini mudah dipahami karena banyaknya pelancong yang harus bermalam, yang sampai batas tertentu, membutuhkan layanan semacam itu.

Meskipun demikian, jumlah pengunjung yang bertambah ke kota ini mendorong adanya upaya untuk melakukan pembenahan fasilitas kota. Itulah yang menjelaskan kenapa tempat-tempat hiburan pun mulai dibangun. Tercatat pada 1884 sebuah perkumpulan *Toneel Braga* dibentuk, dan diresmikan langsung oleh Pieter Sijrhoff, Asisten Residen Bandung. Beberapa tahun kemudian berdiri pula *Societet Concordia* (1895), gedung yang biasa dipakai hiburan oleh orang Eropa kalangan atas. Untuk orang Eropa kelas rendah, termasuk Indo-Eropa tersedia sebuah gedung pertemuan dan hiburan, yaitu *Soos Ons Genoegen* (Gedung YPK sekarang) di jalan Naripan. Kemudian untuk orang-orang Melayu juga ada *Societet Mardi Hardjo* di jalan Kepatihan (Hardjasaputra, 2002, pp. 258–259; Kunto, 1984, p. 299). Kemudian atas gagasan Piter Sijhoff dibangun pula sebuah taman kota pada 1885 di sekitar jalan Braga. Taman ini kemudian diberi nama *Pieter Park*. Di taman ini banyak sekali orang yang berjalan-jalan. Setiap malam minggu sering diadakan pertunjukan orkes oleh orang-orang Eropa (Kunto, 1984, pp. 117–121). Maraknya kehidupan malam semakin didukung oleh penerangan kota di malam hari. Atas prakarsa sang Asisten Residen, sejak akhir abad ke-19 jalanan kota Bandung mulai dipasang lentera minyak tanah (Kunto, 1984, p. 312). Penerangan itu membuat Bandung tidak lagi gelap saat malam. Untuk itu orang pun tak perlu takut untuk jalan-jalan ke tempat hiburan. Gedung-gedung itu masih ada sekarang yang menjadi artefak di Bandung. Keberadaannya telah menjadi prakondisi material kehidupan malam di kota Bandung menjadi lebih ramai.

Sejak dibukanya jalur kereta kedua pada 1906, waktu tempuh Bandung-Jakarta menjadi semakin singkat. Mobilitas penduduk Eropa dari Jakarta ke Bandung pun semakin mengalami peningkatan (Hardjasaputra, 2002, p. 220). Fasilitas kota yang mendukung, seperti tersedianya kebutuhan orang Eropa, udara yang sejuk, dan banyaknya objek wisata di sekitar Bandung semakin mendorong orang-orang Eropa untuk datang ke Bandung. Waktu yang singkat telah memungkinkan seorang pelancong untuk datang dan pergi dalam kunjungan singkat. Kenyataan seperti itu dilihat oleh para pembangun kota Bandung sebagai peluang wisata. Untuk itu mereka pun merasa perlu untuk menertibkan industri pariwisatanya sehingga jadi lebih terorganisir. Pengorganisasian industri pariwisata ini berkaitan dengan pembuatan rute pariwisata di Bandung untuk ditawarkan kepada para pelancong. Selain itu mereka pun merasa perlu untuk membuat publikasi luas tentang keberadaan pariwisata di kota Bandung. Penerbitan *Bandoeng: the mountain city of Netherlands India* karya Steven Anne Reitsma pada tahun 1926 bisa dilihat sebagai sebuah buku panduan terkait Bandung sebagai kota Pariwisata (Reitsma, 1926).

Perlu disampaikan bahwa keberadaan industri pariwisata tidak jarang dihubungkan dengan pelacuran. Ada anggapan bahwa menarik atau tidaknya suatu tempat wisata selalu dikaitkan dengan ketersediaan para perempuannya. Para penggiat pariwisata di Bandung memang dengan tegas menyanggah hal itu. Menurut mereka

pariwisata di Bandung bebas dari unsur-unsur pelacuran semacam itu. Namun, tidak bisa disangkal bahwa kaitan itu tetap ada. Tengok saja misalnya sebuah iklan pariwisata Bandung yang menyebutkan “jangan tinggalkan istri anda di rumah jika ke Bandung” (Kunto, 1984, p. 273). Iklan tersebut menyiratkan adanya hubungan antara pariwisata dengan pelacuran. Kemudian pengamatan yang dilakukan Tio Biau Sing di sekitar Lembang pun menunjukkan hal itu juga. Ia menyebutkan bahwa seiring dengan berkembangnya kawasan Lembang sebagai tempat tujuan wisata, di sana pun banyak berdiri rumah-rumah peristirahatan yang merangkap rumah pelacuran dengan pengelolaan orang Eropa (Tio, 1941, p. 51). Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa pada masa ini kunjungan ke rumah pelacuran lebih bersifat rekreatif.

Sejak tahun 1908 Bandung memiliki sebuah bioskop, Elita, yang terletak di Alun-alun (Voskuil, 1996, p. 43). Selain bioskop, sejak tahun 1912 di Alun-alun Bandung pun telah dijumpai *Feestterrein* (taman hiburan rakyat). Penduduk Bandung mengenalnya sebagai Pistren Varia. Taman tersebut menyediakan hiburan rakyat semisal longser, ketuk tilu, benjang, boksen, *warstelen* (gulat), dan kongkurs nyanyi lagu keroncong. Keberadaan Pistren ini telah menarik pengunjung setiap malam minggu. Bahkan para serdadu dari tangsi militer Cimahi pun rajin berkunjung ke tempat ini karena mereka sangat haus hiburan. Sering kali mereka ikut turun ke gelanggang longser sambil mabuk. Akibatnya pertunjukan itu pun sering berakhir dengan perkelahian (Hardjasaputra, 2000, p. 58; Kunto, 1996).

Keberadaan Bandung sebagai sebuah kota semakin mengalami kemajuan. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya tempat hiburan yang mengundang orang dari luar Bandung untuk berkunjung. Dari tahun 1918-1919, misalnya, dibangun sebuah tempat untuk penyelenggaraan festival tahunan *Jaarbeurs*. Bangunan itu diresmikan pada 1920. Sejak itu setiap tahun pada Juni-Juli diselenggarakan *Jaarbeurs*. Penyelenggaraan *Jaarbeurs* ini telah mengundang banyak orang untuk datang ke Bandung (Hardjasaputra, 2002, p. 40; Kunto, 1984, pp. 66–67; Voskuil, 1996, pp. 40–41). Selain itu juga ada pacuan kuda pada bulan-bulan ini yang sudah diselenggarakan sejak akhir abad ke-19. Pada malam-malam penyelenggaraan festival tahunan ini kehidupan malam sangatlah ramai. Namun di antara berbagai jenis hiburan yang ada di Bandung, sepertinya bioskoplah yang paling digemari. Hiburan yang murah ini mungkin lebih menjadi pilihan karena dianggap benar-benar baru.

Dalam kaitannya dengan praktik pelacuran, laporan koran menyebutkan bahwa para pelacur Pribumi ini biasa mangkal di sekitar Alun-alun. Mereka ”berdiri pada tonggak-tonggak kawat dan tiang-tiang lampoe” (Syarif, 1924). Kehidupan malam Alun-alun yang ramai dengan hiburan memungkinkan para pelacur ini untuk berpraktik di sana. Kemudian keberadaan tempat-tempat hiburan di sekitar Braga pun semakin membuat kehidupan malam di sekitar Alun-alun terasa hangat. Selain Alun-alun, tempat lain yang juga marak dengan pelacuran orang-orang Pribumi adalah kawasan sekitar Tegallega. Penyelenggaraan festival tahunan seperti Pacuan Kuda, membuat pelacuran tumbuh subur di kawasan ini.

Tempat lain yang juga sering disebut sebagai pusat pelacuran pribumi adalah Astanaanyar. Pada masanya kawasan ini cukup dikenal sebagai tempat pelacuran yang permanen; maksudnya pelacuran di kawasan ini terdiri dari rumah bordil. Keberadaan Astanaanyar sebagai tempat pelacuran bisa dilihat dalam hubungannya dengan Tegallega. Lokasi Astanaanyar yang berdekatan dengan pusat hiburan malam semacam Tegallega sangat memungkinkan tumbuhnya pelacuran (Anonim, 1917).

Tempat-tempat yang disebutkan sebagai pusat pelacuran sampai saat ini masih ada. Hanya saja keberadaannya tidak lagi dikaitkan dengan praktik pelacuran. Meskipun demikian, dengan melakukan penelusuran ke tempat-tempat tadi, kemudian melihat letaknya yang tidak jauh dengan pusat keramaian dan stasiun kereta, akan menjadi sangat mudah dipahami bahwa praktik pelacuran yang berkembang di Bandung pada awal abad ke-20 memang erat berkaitan dengan perkembangan kehidupan urban di kota ini.

SIMPULAN

Tulisan ini dimulai dengan pertanyaan terkait praktik pelacuran di Bandung pada masa kolonial yang kerap dihubungkan dengan kebiasaan para perempuannya yang gemar bersolek. Pendapat yang cukup bias gender ini cukup banyak ditemui dalam kesaksian orang Eropa maupun orang-orang Pribumi. Pendapat yang sampai batas tertentu sebetulnya merefleksikan anggapan sebagian besar orang tidak bisa hanya disematkan kepada para perempuan Sunda. Lebih dari itu, praktik pelacuran itu sendiri sebetulnya merupakan sebuah fenomena yang kompleks. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari kondisi-kondisi material yang menjadi prasyaratnya, seperti moral seksualitas yang berlaku di suatu kebudayaan dan perkembangan perkotaan. Kedua hal ini, dalam kasus Bandung, cukup bisa menjelaskan mengapa praktik pelacuran di kota pedalaman ini cukup banyak terjadi.

Dalam kaitannya dengan kehidupan urban yang menjadi prakondisi material praktik pelacuran, tempat-tempat yang identik dengan pelacuran masih ada sampai saat ini. Alun-alun kota Bandung, jalan Braga, Stasiun Kereta Bandung, dan Astana Ayar merupakan tempat-tempat yang tidak asing di Bandung hari ini. Hanya saja keberadaannya tidak lagi dihubungkan dengan praktik pelacuran. Tapi, dengan melihat tempat-tempat tersebut sebagai pusat keramaian di hari ini akan memudahkan kita memahami kondisinya di masa lalu.

Demikian, pernyataan bahwa kebiasaan bersolek perempuan Sunda sebagai penyebab pelacuran, tidak bisa dipertahankan. Pernyataan tersebut merupakan sebuah ekspresi bias gender yang menjadikan perempuan berada di posisi yang paling bersalah. Cara pandang ini juga masih banyak dipertahankan di masa kini. Praktik yang merendahkan perempuan ini juga merupakan cara bagaimana agar perempuan dijauhkan dari kontrol atas tubuhnya sendiri. Kegemarannya untuk memamat-mamat diri kemudian dijadikan dasar atas perilaku amoral. Padahal, bukan hanya perempuan, laki-laki juga tidak sedikit yang suka bersolek, tapi tidak ada tuduhan apa pun terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (1917). *Pertimbangan*. No. 32.
- Boomgaard, P. (1986). The Welfare Services in Indonesia, 1900–1942. *Itinerario*, 10 (01), 57–81.
- Boomgaard, P. (2004). *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880* (M. Sosman & K. S. Toer, Trans.). Jakarta: Djambatan.
- Corbin, A. (1978). Le péril vénérien au début du siècle: Prophylaxie sanitaire et prophylaxie morale. *Recherches*, 29, 245–283.
- Cotter, J. L. (1974). Above Ground Archaeology. *American Quarterly*, 26(3), 266–280.
- Du Perron, E. (1999). *Country of origin*. Hongkong: Periplus.
- Goldfield, D. R. (1975). Living History: The Physical City as Artifact and Teaching Tool. *The History Teacher*, 8(4), 535.
- Hardjasaputra, A. S. (Ed.). (2000). *Sejarah Kota Bandung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Hardjasaputra, A. S. (2002). *Perubahan Sosial di Bandung, 1810-1906* [Disertasi]. Depok: Universitas Indonesia.
- Holt, C. (2000). *Melacak jejak perkembangan seni di Indonesia*. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Husken, F. (1994). Declining welfare in Java; Government and private inquiries, 1903-1914. In R. Cribb (Ed.), *The late colonial state in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942* (pp. 213–228). Leiden: KITLV Press.
- Jaelani, G. A. (2013). *Penyakit kelamin di Jawa, 1812-1942*. Bandung: Syabas Books.
- Jaelani, G. A. (2017). *La question de l'hygiène aux Indes-Néerlandaises: Les enjeux médicaux, culturels et sociaux*. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- Jaelani, G. A. (2019). Dilema Negara Kolonial: Seksualitas dan Moralitas di Hindia Belanda Awal Abad XX. *Jurnal Patanjala*, 11 (1), 1–16.
- Juhana. (1996). *Carios Agan Permas*. Jakarta: Girimukti Pasaka.
- Kohlbrugge, J. F. H. (1900). Prostitutie in Nederlandsch-Indie. *Indische Genotschap*, 2–36.
- Kol, H. van. (1903). *Uit onze koloniën: Uitvoerig reisverhaal*. Leiden: Sijthoff.
- Kunto, H. (1984). *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: Granesia.
- Kunto, H. (1996, Kamis Agustus). Serba-Serbi Nonton Bioskop di Bandung Tempo Dulu. *Pikiran Rakyat*.
- Lubis, N. H. (1998). *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera. IXb3: Verheffing van de inlandsche vrouw*. (1914). Batavia: Kolff.

- Onderzoek naar de Mindere Welvaart: Samentrekking van de Afdeulingsverslagen over de Uitkomsten der Onderzoekingen naar de Economie van de Desa in de Residentie Preanger-Regentschappen.* (1907). Batavia: Kolff.
- Onghokham. (1991). Kekuasaan dan Seksualitas: Lintasan Sejarah Pra dan Masa Kolonial. *Prisma*, 7, 15–23.
- Prostitutie. (1902). In *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Prostitutie. (1919). In *Encyclopedie van Nederlandsch Oost-Indie*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Reid, A. (2014). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin* (M. Pabotinggi, Trans.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Reitsma, S. A. (1926). *Bandoeng: The mountain city of Netherlands India*. Batavia: C. Kolff.
- Schlereth, T. J. (1980). Above-Ground Archaeology: Discovering a Community's History through Local Artifacts. In T. J. Schlereth, *Artifacts and the American Past* (pp. 184–206). Tennessee: American Association for State and Local History.
- Suharto, B. (1980). *Tayub, Pertunjukan dan Ritus Kesuburan*. Bandung: Masyarakat Seni dan Pertunjukan Indonesia.
- Sujana, A. (2002). *Tayub Kalangenan Menak Priangan*. Bandung: STSI Press.
- Syarif, A. (1924). *Bintang Hindia*, 223–224.
- Tio, B. S. (1941). *De syphilis in het Regentschap Bandoeng*. Batavia: Keng Po.
- Toemenggong, Ch. Sj. D. (1936). Bestrijding van den Vrouwenhandel. In M. A. E. van Lith-van Scgreven & J. H. Hooykaas-van Leeuwen Boonkamp (Eds.), *Indische Vrouwenjaarboek* (pp. 55–58). Jogjakarta: Kolff-Bunning.
- Veyne, P. (1979). *Comment on écrit l'histoire*. Paris: Edition du Seuil.
- Voskuil, R. P. G. A. (1996). *Bandoeng: Beeld van een Stad*. Nederland: Asia Maior.